

Efektifitas Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

* **Adwaa Mardiah¹, Panca Setyo Prihatin²**

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : adwamardiah@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam menangani pelanggaran pada Pilkada 2024. Tantangan dan permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian adalah masih terjadinya beberapa pelanggaran seperti politik uang, pelanggaran administrasi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektivitas pengawasan yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan tujuh informan dari unsur Bawaslu dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Riau telah menjalankan tugasnya sesuai regulasi, dengan rata-rata penyelesaian laporan dua hari - lima hari setelah laporan diterima. Meskipun efektif, pengawasan masih menghadapi tantangan pada aspek SDM dan transparansi informasi. Penelitian yang dilakukan ini memberikan kontribusi bagi penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci: Bawaslu, Pilkada 2024, pengawasan pemilu, pelanggaran, efektivitas

Abstract

This study examines the effectiveness of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Riau Province in addressing violations during the 2024 Regional Head Election. The main challenges highlighted in the study include ongoing issues such as vote-buying, administrative violations, and low public participation. The objective of this research is to evaluate how effective the supervisory efforts have been. A descriptive qualitative method was employed by conducting interviews with seven informants from Bawaslu and the public. The results show that Bawaslu Riau performed its duties in accordance with existing regulations, with the average time for resolving reports ranging from two to five days after they were received. Although generally effective, supervision still faces obstacles related to human resources and transparency of information. This research contributes to strengthening the institutional capacity of election supervision and improving the quality of local democracy.

Keywords : Bawaslu, 2024 regional election, election supervision, violations, effectiveness

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis oleh rakyat. Dalam praktiknya, Pilkada bukan hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan kualitas partisipasi dan integritas sistem politik daerah. Namun demikian, pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau Tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pelanggaran yang mengancam prinsip keadilan dan transparansi.

Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Riau, tercatat sebanyak 250 laporan pelanggaran yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Pelanggaran terbanyak terjadi di Kabupaten Rokan Hilir (82 kasus) dan Kota Pekanbaru (34 kasus). Jenis pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, hingga tindak pidana pemilu seperti politik uang, kampanye saat masa tenang, penggunaan fasilitas negara, hingga intimidasi terhadap pemilih. Dari jumlah tersebut, hanya 94 laporan yang berhasil diregistrasi dan ditindaklanjuti, menunjukkan adanya kendala dalam efektivitas penanganan pelanggaran.

Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas utama dalam mengawasi dan menindak pelanggaran di setiap tahapan Pilkada, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Riau telah merespons sebagian besar laporan dalam waktu 2–5 hari kerja. Namun, pengawasan masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan partisipasi masyarakat, serta kurangnya transparansi akses pelaporan, yang berdampak pada efektivitas pengawasan secara menyeluruh.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam menyelesaikan pelanggaran Pilkada 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada tujuh informan yang terdiri dari unsur Bawaslu dan masyarakat pelapor. Fokus penelitian diarahkan pada tiga bentuk pelanggaran utama yang ditemukan: pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu.

Dengan mengkaji secara empiris peran Bawaslu dalam menangani berbagai pelanggaran tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan dan sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang perlu segera diperbaiki demi mendukung pemilu yang demokratis, adil, dan transparan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau dalam penyelesaian pelanggaran pada Pilkada 2024. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena empiris secara menyeluruh, serta untuk menangkap makna, strategi, dan tantangan pengawasan dari sudut pandang para pelaksana dan pelapor.

Desain penelitian yang digunakan bersifat interpretatif, di mana pemahaman terhadap pelaksanaan pengawasan dibangun melalui interaksi peneliti dengan narasumber yang memiliki pengalaman langsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, yang merupakan lokasi kantor Bawaslu Provinsi Riau, serta melibatkan data dan informasi dari kabupaten/kota lain se-Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu Januari hingga April 2025, pada masa pasca tahapan Pilkada.

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposif, yakni dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran Pilkada. Total terdapat tujuh informan, terdiri atas lima orang dari unsur internal Bawaslu Provinsi Riau di antaranya koordinator divisi, staf penanganan pelanggaran, dan bagian hukum serta dua orang masyarakat pelapor pelanggaran pemilu. Informan memiliki rentang usia antara 30 hingga 50 tahun, dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan terhadap topik penelitian. Kriteria inklusi dalam pemilihan informan adalah mereka yang memiliki kapasitas untuk memberikan informasi primer yang valid dan aktual terkait dengan efektivitas pengawasan pelanggaran.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman terbuka, dokumentasi terhadap laporan resmi pelanggaran dan putusan sengketa, serta observasi terbatas terhadap sistem dan proses pelaporan pelanggaran yang digunakan oleh Bawaslu. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan pengkodean terbuka terhadap hasil wawancara dan dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti waktu penanganan laporan, jenis pelanggaran, kendala pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi guna memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian pelanggaran Pilkada tahun 2024. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima indikator utama: tingkat penanganan pelanggaran, jenis pelanggaran administratif yang dominan, transparansi pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat.

1. Tingkat Penanganan Pelanggaran

Bawaslu Provinsi Riau menerima 250 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024, Per tgl 01 maret 2025, namun hanya 94 laporan yang berhasil diregistrasi karena sebagian besar tidak memenuhi unsur formil dan materil. Waktu penyelesaian terhadap laporan yang teregistrasi berkisar antara dua hingga lima hari, sesuai ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa secara prosedural, mekanisme penanganan pelanggaran berjalan efektif dan responsif terhadap regulasi.

Tabel 1.
Jumlah Laporan dan Registrasi Pelanggaran Pilkada 2024

No	Wilayah	Laporan Masuk	Laporan Teregistrasi
1	Provinsi Riau	15	6
2	Kota Pekanbaru	34	6
3	Kota Dumai	19	12
4	Kab Kampar	26	9
5	Kab Pelelawan	10	5
6	Kab Kuantan Singingi	16	10
7	Kab Rokan Hilir	82	10
8	Kab Rokan Hulu	3	1
9	Kab Indragiri Hilir	5	4
10	Kab Indragiri Hulu	4	4
11	Kab Meranti	2	1

No	Wilayah	Laporan Masuk	Laporan Teregistrasi
12	Kab Bengkalis	2	11
13	Kab Siak	32	15
	Total	250	94

Sumber :Bawaslu Provinsi Riau Per tanggal 01 Maret 2025

2. Jenis Pelanggaran Administratif

Dua jenis pelanggaran administratif yang paling dominan adalah:

- 1) pelaksanaan kampanye saat masa tenang, dan
- 2) tidak menonaktifkan akun media sosial pasangan calon selama masa tenang.

Kampanye di masa tenang dilakukan melalui tatap muka atau penyebaran bahan kampanye. Sementara itu, pelanggaran media sosial terjadi ketika akun resmi pasangan calon tetap menampilkan konten kampanye melebihi batas waktu yang ditentukan. Kedua bentuk pelanggaran ini tergolong mudah dibuktikan, karena melibatkan dokumentasi visual dan digital.

Tabel 2.
Jenis Pelanggaran Administratif yang Ditangani

No	Bentuk Pelanggaran	Jeis Pelanggaran
1	Kampanye saat masa tenang	Administratif
2	Tidak menonaktifkan akun media sosial	Administratif

Sumber: Bawaslu Provisi Riau

Dari data dan bukti yang akurat Bawaslu berhasil menyelesaikan kedua bentuk pelanggaran ini secara administratif, namun tingkat pelaporan dari masyarakat masih rendah.

3. Transparansi Proses Pengawasan

Bawaslu telah melakukan publikasi hasil pengawasan melalui media sosial, podcast, dan laman resmi. Namun, efektivitas transparansi belum optimal karena keterbatasan akses dan literasi digital masyarakat. Banyak warga, terutama di daerah, belum mengetahui cara mengakses atau memahami informasi pengawasan secara penuh. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih perlu ditunjang dengan peningkatan sosialisasi dan edukasi digital.

4. Koordinasi Antarlembaga

Koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu telah dilaksanakan, namun implementasinya belum maksimal. Tidak ada satupun kasus pelanggaran pidana pemilu yang berhasil ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan. Koordinasi masih bersifat administratif dan belum efektif dalam aspek substansi penegakan hukum.

Tabel 3.
Kegiatan Koordinasi Bawaslu Riau dengan Lembaga Terkait

No	Jenis Kegiatan	Frekuensi	Mitra Lembaga
1	Rapat Gakumdu	4 Kali	Kejaksaan, Polri
2	Rapat Teknisi	2 Kali	KPU, Bawaslu
3	Sosialisasi Publik	5 Kali	Masyarakat, Ormas

Sumber :Bawaslu Provinsi Riau Per tanggal 01 Maret 2025

5. Partisipasi Masyarakat

Meskipun jumlah laporan pelanggaran cukup tinggi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan masih rendah. Sebagian besar laporan berasal dari pengawas lapangan, bukan dari masyarakat umum. Faktor utama penyebab rendahnya partisipasi adalah ketidaktahuan prosedur pelaporan, kekhawatiran terhadap tekanan sosial, serta keterbatasan bukti. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran publik dalam pengawasan partisipatif.

Secara umum, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dinilai cukup efektif secara administratif, terutama dalam kecepatan penanganan pelanggaran dan identifikasi dua bentuk pelanggaran utama. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif secara substantif karena keterbatasan dalam partisipasi masyarakat, kendala dalam distribusi pengawas, dan lemahnya penindakan pidana pemilu akibat belum optimalnya koordinasi lintas lembaga. Penguatan pengawasan ke depan perlu diarahkan pada aspek edukatif dan kolaboratif, bukan hanya prosedural.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam penyelesaian pelanggaran pada Pilkada 2024. Berdasarkan hasil analisis terhadap lima indikator yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau tergolong efektif secara prosedural, khususnya dalam hal penanganan pelanggaran administratif yang dominan berupa kampanye saat masa tenang dan tidak menonaktifkan akun media sosial. Proses penyelesaian pelanggaran telah sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Namun demikian, efektivitas pengawasan secara substantif masih menghadapi tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran, serta belum optimalnya transparansi informasi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penghambat dalam pencapaian pengawasan yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si., A. P. (2023). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. widina media utana.
- Birohmatika, M. N., & Diana, R. R. (2012). Makna Suluk Pada Lansia Anggota Jamaah Tarekat Naqsyabandiyah. *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 17(2), 39–51.
- Dinamis, A., & Pelayanan, E. (2024). *Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Marshal Hanny Horota, Priyanto SMIA – Vol. 2 No. 2 Tahun 2024*. 2(2), 215–230.
- Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Dr. Siti Aisyah, M.M., Roni Wiranata, S. P. M. P. (2024). *Dasar-Dasar Manajemen ; Teori dan Praktek Dalam Organisasi & Pendidikan*. PT. Nas Media Indonesia Anggota IKAPI.
- Dr.Muhammad Idrus. (2007). *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Ull Press Yogyakarta.
- Endang, M. I. A. (2014). *Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Discretion And Responsibility Of Government Officials Based On Law Of State Administration*. 223–244.

- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana PrenadaMedia Grup.
- Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539–552.
- Hidayati, R., & Mauliansyah, F. (2020). Peninjauan Partisipasi Politik Bagi Perempuan Pada Pemilu 2019 di Kecamatan Meureubo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar*, 1(1), 182. <https://doi.org/10.35308/baktiku.v1i1.1442>
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016*. 3(2), 91–102.
- Malik, A., Rahim, A., & Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599–3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>
- Merdekawati, D., Fahmi, S., Ilmu, M., Pascasarjana, H., & Kuning, U. L. (2022). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Kementerian Dan Kelembagaan Pada Pemilihan. *Ncssr*, 493–498.
- Muzahhirin, C. E. P., & Program. (2018). Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7.
- Nabela, T. K. (2024). Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016. 3(3), 415–427.
- Oktriani, E., Lestanata, Y., & Zitri, I. (2025). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024. 3(1), 11–22.
- Ompetensi Komunikasi Pengawas Pemilu Pada Pilkada Riau 2018*. (n.d.).
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu*. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Priyanti, E., Agustin, D. R., Pradani, W. I., & Noviyanti, D. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Mening*. 76–84.
- Prof. Dr.H. Inu Kencana Syafie. (2022). *Ilmu pemerintahan*. PT Bumi Aksara.
- Putera, R. A., & Karliani, E. (2025). Peran partai keadilan sejahtera dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di kota palangka raya. 5, 414–427.
- Putusan Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025*. (2016). 1–23.
- Rabina Yunus. (2022). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. humanities genius.
- Rahmawati Halim.,S.Sos,M.Si., M. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat :Teori dan Praktik*. CV SAH MEDIA.
- ramlan surbakti. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang*

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U. 1–90.*
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rosidin, U. (1945). *Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Dilaksanakan Oleh. 1.*
- Suci, Ramia Saputri, Sulkaidah Kanang, N. (2024). *Supervisi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Guru Secara Efektivitas Dan Efisiensi. 09, 256–265.*
- Waluyo, P. F., & Rodiyah, I. (2023). Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 5(2), 172–186.* <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.987>
- Yuridis, T., Kebencian, U., Pemilu, D., Undang, B. U.-, & Indonesia, R. (2024). *Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia on Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017. 3(1).*